

Judul : Permerintah minta platform digital halau hoaks pemilu
Tanggal : Jumat, 17 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pemerintah Minta Platform Digital Halau Hoaks Pemilu

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Seriadi menggandeng platform digital untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka diminta membuat pos komando (posko) sebagai sarana koordinasi dalam mengahalui hoaks dan konten negatif.

"Saya meminta kepada *Whatsapp* dan *Meta* untuk mencurahkan energi lebih dan sumber daya secara optimal untuk menjaga ruang digital dengan membuat Posko Siaga Pemilu," kata Budi dalam semi-

nar secara daring, kemarin. Budi mengatakan keberadaan posko tersebut sangat penting. Posko itu menjadi sarana koordinasi dalam menghalau hoaks dan segala bentuk konten negatif. "Posko ini harus beroperasi 24 jam non-stop sepanjang masa pemilu," tegas dia.

Budi juga mengusulkan titik posko itu berada di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat. Tujuannya alur komunikasi antara pemerintah dan platform digital lebih cepat.

Ketua Umum Pro Jokowi itu

juga mengungkapkan ratusan hoaks soal pemilu terdeteksi periode Januari 2022 hingga medio November 2023.

Budi mengatakan hoaks itu tersebar di berbagai platform digital.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan pengelola aplikasi media sosial *Tiktok* untuk disseminasi informasi kepiluan yang lebih kredibel menjelang Pemilu 2024.

"Dalam riset-riset yang kami baca, di antaranya yang popu-

ler diakses itu adalah *Tiktok*. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang strategis ketika KPU bekerja sama dengan *Tiktok* untuk menyebarkan perkembangan informasi kepiluan," kata Hasyim.

Melalui kerja sama tersebut, Hasyim berharap *Tiktok* menyiapkan strategi kebijakan internal untuk mencegah penyebaran disinformasi, hoaks, atau fitnah, khususnya mengenai konten-konten kepiluan. Hal itu penting mengingat jumlah pengguna *Tiktok* banyak.

"Kami harapkan karena begitu banyaknya konten orang yang mengunggah lewat *Tiktok*, penting juga kalau sudah mulai masuk konten konten kepiluan. Kami berharap *Tiktok* juga menyiapkan berbagai macam strategi *policy* (kebijakan) di internal," ucapnya. Hasyim juga berharap *Tiktok* menjadi penyaring sekaligus penerang apabila ada informasi miring. Dengan begitu, para pengguna tidak terombang-ambing atau bingung dengan konten yang menyesatkan tersebut. (Teo/An/P-2)